

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BAPENDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Anisa Putri¹, Gusrianti², Rini Elvira³, Yuwarman Mansur⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: anisa2103473@gmail.com¹, gusrianti@uinbukittinggi.ac.id²,
rinielvira@uinbukittinggi.ac.id³, yuwarmanmansur@yahoo.co.id⁴

ABSTRAK

Dengan memanfaatkan data Laporan Realisasi Anggaran 2019–2023, penelitian ini menilai kinerja keuangan BAPENDA Provinsi Sumatera Barat melalui ukuran efektivitas dan efisiensi. Rasio efektivitas mengukur kemampuan pencapaian target pendapatan, sedangkan rasio efisiensi menilai penggunaan anggaran secara ekonomis dan optimal untuk mendukung tujuan organisasi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder dari laporan anggaran BAPENDA lima tahun terakhir. Penelitian ini berfokus pada analisis rasio efektivitas, yakni perbandingan antara capaian realisasi pendapatan terhadap anggaran yang telah direncanakan, serta rasio efisiensi yang menilai sejauh mana realisasi belanja sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Data yang dikumpulkan diolah untuk mengidentifikasi pola perkembangan kinerja keuangan daerah setiap tahunnya, dengan landasan teori dan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kinerja yang tergolong efektif secara umum, meskipun sempat mengalami penurunan dalam periode pandemi, kemudian meningkat berkat penyesuaian kebijakan dan inovasi digital. Sebaliknya, rasio efisiensi belanja tergolong kurang efisien, menunjukkan alokasi anggaran yang belum optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan pada aspek perencanaan yang berorientasi pada kinerja, pengendalian internal, serta mekanisme evaluasi anggaran guna memastikan proses pengelolaan keuangan berlangsung secara lebih efektif, transparan, dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kinerja Keuangan, BAPENDA, Laporan Realisasi Anggaran.

ABSTRACT

Utilizing data from the 2019–2023 Budget Realization Report, this study assesses the financial performance of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of West Sumatra Province through effectiveness and efficiency measures. The effectiveness ratio measures the ability to achieve revenue targets, while the efficiency ratio assesses the economical and optimal use of the budget to support organizational goals. The approach used is descriptive qualitative, utilizing secondary data from the BAPENDA budget reports for the past five years. This study focuses on the analysis of the effectiveness ratio, which compares revenue realization to the planned budget, and the efficiency ratio, which assesses the extent to which spending realization is in accordance with the allocated budget.

The collected data is processed to identify patterns of regional financial performance development each year, based on theory and applicable government regulations. Based on the analysis, the revenue effectiveness ratio indicates generally effective performance, although it experienced a decline during the pandemic, then improved thanks to policy adjustments and digital innovation. Conversely, the expenditure efficiency ratio is considered less efficient, indicating suboptimal budget allocation. The research findings indicate that improvements are needed in performance-oriented planning, internal control, and budget evaluation mechanisms to ensure a more effective, transparent, and sustainable financial management process.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Financial Performance, BAPENDA, Budget Realization Report.*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Yuniawati, 2023, p. hlm 1). Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, serta bertanggung jawab menuntut pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah secara lebih akuntabel, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah (Mizan & Rahmawati, 2020, p. hlm 100).

Salah satu misi otonomi daerah adalah menciptakan sistem perencanaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas (Fitri & Indriani, 2011, p. hlm 23). Oleh karena itu, Indonesia telah beralih dari sistem anggaran tradisional ke sistem penganggaran berbasis kinerja sejak diterapkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pergeseran ini menjadi bagian dari reformasi keuangan negara, di mana anggaran tidak lagi hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga menjadi instrumen pencapaian tujuan strategis (Medindari et al., 2024, p. hlm 64).

Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab pengelolaan (BAPENDA SUMATERA BARAT, 2024) terdiri atas berbagai sumber, antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, serta retribusi yang berasal dari pelayanan publik, kegiatan usaha, dan jenis perizinan tertentu. Efektivitas dan efisiensi merupakan dua elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang semakin mengemuka sejak awal periode

otonomi daerah. Efektivitas mengacu pada seberapa baik pemerintah daerah melaksanakan kegiatan atau mencapai hasil yang direncanakan (Yusri & Devy, 2025). Singkatnya, efektivitas adalah perbandingan antara hasil akhir dan keluaran, sementara efisiensi melibatkan pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan yang minimal untuk mencapai keluaran tertentu yang terkait dengan target kinerja yang telah ditentukan (Koromath, 2020).

Penilaian terhadap kinerja keuangan daerah umumnya berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran, karena laporan ini memberikan informasi langsung mengenai tingkat realisasi pendapatan dan belanja. Oleh karena itu, posisinya dinilai lebih penting dibandingkan laporan neraca (Chartady et al., 2022).

Tabel 1. LRA Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 – 2023

TA	Pendapatan		%
	Target	Realisasi	
2019	2,375,930,636,830	2,354,459,535,445	99.10
2020	2,528,472,797,867	2,251,335,223,743	89.04
2021	2,469,508,994,798	2,551,889,163,309	103.34
2022	2,821,838,323,784	2,848,247,250,824	100.94
2023	3,034,554,065,207	2,766,865,613,516	91.18

Sumber: LAKIP BAPENDA SUMBAR TA 2019 – 2023

Data Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat periode anggaran 2019-2023 menunjukkan variasi pencapaian pendapatan, terutama penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Meskipun pendapatan mulai pulih pada tahun 2021 dan 2022, penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 akibat anggaran pendapatan yang terlalu ambisius tidak didukung oleh kinerja penagihan yang membaik.

Pandemi COVID-19 telah menekan keuangan daerah melalui penurunan pendapatan dan peningkatan belanja. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tambahan anggaran penanganan pandemi mencapai puluhan triliun rupiah pada 2020–2022. Hal tersebut menekankan pentingnya analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam menangani kondisi darurat (Ishak, 2021).

Penelitian lainnya telah menghasilkan temuan yang beragam. (Medindari et al., 2024) menyatakan bahwa pengeluaran target Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sangat efektif tetapi tidak efisien. (Sasuwuk et al., 2016) menemukan bahwa dari sisi pendapatan dan belanja,

kinerja APBD Kabupaten Minahasa Utara tergolong baik, tetapi aspek desentralisasi masih perlu diperkuat untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal. (Kusumawati et al., 2022) menyatakan bahwa pengelolaan target anggaran di Dinas Sosial Kota Mataram cukup efisien pada tahun-tahun tertentu. Selain itu, (Rahman & Saputra, 2022) merekomendasikan digitalisasi dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, semua studi ini dilakukan pada lembaga level-2, dalam jangka waktu terbatas, dan tidak secara khusus membahas dampak pandemi.

Oleh karena itu, studi ini menawarkan kebaruan karena berfokus pada lembaga daerah level-1, yaitu penelitian ini berfokus pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat dengan rentang waktu yang meliputi periode sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kinerja keuangan BAPENDA melalui analisis rasio efektivitas dan efisiensi selama periode 2019–2023. Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

B. LANDASAN TEORI

Teori keuangan publik merupakan landasan penting dalam penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), keuangan publik adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola sumber-sumber keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Dalam konteks pemerintahan daerah, teori keuangan publik menjadi dasar bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber keuangan secara mandiri guna mendukung pembangunan daerah.

Musgrave, (2009) menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi utama dalam keuangan publik, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik, fungsi distribusi bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi berperan menjaga keseimbangan ekonomi makro. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan oleh pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan publik dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Mahmudi, (2016) menambahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada prinsip *value for money* yang terdiri dari unsur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya publik secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua konsep penting dalam manajemen keuangan sektor publik, yang menekankan akuntabilitas dan pencapaian hasil. Efektivitas menggambarkan seberapa baik suatu program atau kegiatan mencapai tujuannya, sementara efisiensi menggambarkan sejauh mana sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Dalam pengelolaan anggaran publik, rasio efektivitas dan efisiensi digunakan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Laporan Realisasi Anggaran digunakan sebagai dasar perhitungan, di mana rasio efektivitas merepresentasikan perbandingan antara realisasi dan target pendapatan, sedangkan rasio efisiensi menggambarkan keterkaitan antara realisasi pendapatan dengan anggaran belanja.

Studi-studi lainnya banyak memanfaatkan indikator efektivitas dan efisiensi untuk mengukur tingkat kinerja organisasi publik dalam pengelolaan keuangannya. Dalam penelitiannya, (Medindari et al., 2024) menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama tiga tahun terakhir, dengan hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan secara efektif, meskipun dari sisi efisiensi masih belum optimal. Selanjutnya penelitian oleh (Kusumawati et al., 2022) studi pada Dinas Sosial Kota Mataram mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran telah mencapai efektivitas tinggi, meskipun efisiensi masih berfluktuasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian kinerja keuangan memerlukan pengamatan simultan terhadap efektivitas dan efisiensi agar hasil evaluasi lebih menyeluruh. Sementara itu, (Rahman & Saputra, 2022) menegaskan bahwa penerapan sistem digital dalam mengelola anggaran diperlukan guna memperkuat efisiensi serta meningkatkan transparansi keuangan publik.

Meskipun tema ini telah banyak dikaji, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota (daerah tingkat II) dan dilaksanakan dalam kondisi normal. Namun, situasi krisis seperti pandemi COVID-19 terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur pendapatan maupun belanja daerah. (Ishak, 2021) menunjukkan bahwa selama masa COVID-19, pemerintah daerah menghadapi penurunan

signifikan pada Pendapatan Asli Daerah serta mengalami peningkatan belanja yang bersifat mendadak dan tidak terencana. Selanjutnya (Fitri & Kiswara, 2022) menyatakan bahwa seluruh 34 pemerintahan tingkat provinsi menghadapi tekanan fiskal yang tinggi karena adanya pergeseran fokus anggaran ke bidang kesehatan dan bantuan sosial selama pandemi. Meski demikian, kajian yang menganalisis perbandingan efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan pada tiga fase utama pra-pandemi, masa pandemi, dan pasca-pandemi masih jarang dilakukan, terutama pada lembaga tingkat provinsi seperti BAPENDA Sumatera Barat.

Masih terdapat kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menilai rasio efektivitas dan efisiensi secara statis tanpa memperhitungkan variasi tahunan maupun faktor eksternal, seperti dampak pandemi. Lebih jauh lagi, belum banyak studi yang menerapkan trend analysis untuk mengamati perubahan kinerja secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Analisis tren menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal, proses digitalisasi, dan strategi adaptasi keuangan berkembang di lembaga seperti BAPENDA selama masa krisis dan setelahnya.

Dengan menggunakan kerangka teori yang berlandaskan pada konsep efektivitas dan efisiensi sebagaimana dikembangkan dalam teori manajemen kinerja pada sektor publik (Mahmudi, 2019), berdasarkan bukti empiris dari studi terkini, evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA Provinsi Sumatera Barat periode 2019–2023 menjadi penting. Penilaian ini akan memberikan pemahaman mengenai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran mengalami perubahan akibat gangguan eksternal, serta bagaimana strategi kelembagaan berperan dalam mendukung pemulihan kinerja.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dengan pelaksanaan mulai 1 Oktober 2024 sampai dengan Juli 2025. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sejarah, visi dan misi, serta informasi lainnya.

Instansi yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat, yang mewakili pemerintah daerah tingkat I. Sumber data utama diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan dokumentasi, yakni dengan menelusuri dan mengunduh data dari situs resmi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat (<https://bapenda.sumbarprov.go.id/>). Data yang dikaji dibedakan menjadi dua kelompok: (1)

data umum, berupa informasi mengenai profil dan struktur organisasi BAPENDA, serta (2) data khusus, berupa laporan realisasi anggaran untuk periode 2019–2023.

Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk menilai pelaksanaan anggaran melalui pengukuran efektivitas dan efisiensi. Sejalan dengan permasalahan yang dikaji, peneliti menerapkan teknik analisis rasio keuangan, yang mencakup rasio efektivitas serta rasio efisiensi.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Persentase Kriteria Efektivitas

Persentasi Pengukuran	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Trend Efektivitas

Analisis tren efektivitas dilakukan untuk mengidentifikasi pola perubahan tingkat efektivitas keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dari tahun ke tahun. Apabila hasil perhitungan menunjukkan persentase tren efektivitas lebih dari 100%, hal tersebut menandakan adanya peningkatan efektivitas kinerja. Semakin besar nilai persentase tren efektivitas, semakin positif pula perkembangan kinerja keuangan BAPENDA. Sebaliknya, nilai di bawah 100% menunjukkan penurunan efektivitas. Rumus perhitungan tren efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Trend Efektivitas} = \frac{\text{Efektivitas Tahun Pembanding}}{\text{Efektivitas Tahun Dasar}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan melalui membandingkan antara jumlah realisasi belanja dengan keseluruhan target belanja yang dianggarkan pada periode tertentu.

$$\text{Rumus Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3. Persentase Kriteria Efisiensi

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi
Di atas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 % - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Trend Efisiensi

Analisis tren efisiensi dilakukan untuk mengamati perubahan dan perkembangan efisiensi pengelolaan keuangan BAPENDA sepanjang periode tertentu. Jika nilai tren efisiensi melebihi 100%, berarti terjadi peningkatan efisiensi, sedangkan nilai di bawah 100% menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase tren efisiensi tiap tahun, semakin baik pula kinerja keuangan BAPENDA. Rumus perhitungan tren efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Trend Efisiensi} = \frac{\text{Efisiensi Tahun Pembandingan}}{\text{Efisiensi Tahun Dasar}} \times 100\%$$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang tersedia, kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat selama periode 2019–2023 dapat dianalisis secara komprehensif dengan menitikberatkan pada dua indikator utama, yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Melalui analisis kedua rasio tersebut, kinerja keuangan BAPENDA dapat diukur dalam hal kemampuan mencapai target pendapatan serta tingkat efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah.

Rasio Efektivitas dan Trend Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat berhasil mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Nilai rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa kinerja keuangan BAPENDA semakin optimal dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4. Hasil Persentase Rasio dan *Trend* Efektivitas pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat TA 2019-2023

TA	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas	Trend Efektivitas (%)
2019	2,375,930,636,830	2,354,459,535,445	99,09	Efektif	100
2020	2,528,472,797,867	2,251,335,223,743	89,04	Cukup Efektif	89.89
2021	2,469,508,994,798	2,551,889,163,309	103,34	Sangat Efektif	104,04
2022	2,821,838,323,784	2,851,966,014,892	101,07	Sangat Efektif	102,02
2023	3,034,554,065,207	2,766,865,613,516	91,18	Efektif	91,91
Rata – rata	2,646,060,963,697	2,555,303,110,181	96,74	Efektif	97,57

Sumber: Data olahan 2025

Tabel ini menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan penting karena mencerminkan upaya dan strategi pemerintah untuk secara efektif mengoptimalkan dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang relatif dinamis dalam upaya mencapai efektivitas pendapatan daerah selama lima tahun terakhir, dari anggaran 2019 hingga 2023. Kinerja tersebut mencerminkan pola perubahan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, perubahan kebijakan fiskal, serta dampak COVID-19 yang muncul pada tahun 2020.

Rasio efektivitas sebelum COVID-19 mencapai 99%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mencapai target penerimaan. Kondisi perekonomian yang agak stabil dan sistem administrasi perpajakan yang beroperasi dengan baik menunjukkan kemampuan ini. Ini mempercepat operasi ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah. Ini termasuk pajak atas kendaraan bermotor, biaya balik nama, pungutan daerah, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya. Hal ini juga mencerminkan adanya pengelolaan pendapatan daerah yang efisien serta koordinasi yang harmonis antarinstansi terkait. Penelitian sebelumnya yang relevan yaitu (Setiawan, 2018) data menunjukkan bahwa sebelum pandemi, mayoritas pemerintah daerah di Indonesia mampu mencapai tingkat efektivitas penerimaan lebih dari 90%. Daerah yang menerapkan pajak digital dan memiliki basis data solid mencapai tingkat penerimaan tertinggi.

Namun, pada awal pandemi tahun 2020, hasil persentase ini turun dari 99,09% ke 89,04%, menunjukkan rasio yang cukup efektif. Penurunan ini terjadi karena menurunnya

kegiatan ekonomi, penurunan pemasukan, dan penerapan kebijakan relaksasi pajak dalam upaya perbaikan ekonomi. Pandemi memengaruhi aktivitas ekonomi secara signifikan, menyebabkan penurunan daya beli, penutupan bisnis, dan PHK di banyak sektor. Perekonomian terhambat oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan.

Pada tahun 2021, terlihat adanya pemulihan, ditandai oleh rasio penerimaan yang melebihi 100% dan efektivitas yang sangat tinggi sebesar 103,34%. Peningkatan ini menunjukkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) bisa beradaptasi dengan bencana dengan menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan, termasuk penggunaan sistem layanan pajak digital, penerapan insentif khusus bagi wajib pajak, dan meningkatkan pengawasan pendapatan daerah. *Trend* positif ini berlanjut hingga tahun 2022, dengan persentase efektivitas 101,07%. Hasil tersebut menggambarkan konsistensi pemerintah daerah dalam mempertahankan efektivitas penerimaan, meskipun berada dalam situasi pandemi. Pemerintah tengah membangun layanan digital untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak, pelonggaran regulasi mobilitas publik mendorong perdagangan dan konsumsi, dan aktivitas ekonomi kembali normal.

Hasil beberapa penelitian sebelumnya didukung. Pertama, penelitian oleh (Oktaviani, 2022) pada Pemerintah Kota Padang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD menurun drastis pada tahun 2020 karena pandemi. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, efisiensi kembali meningkat setelah perubahan sistem pajak menjadi digital dan perbaikan strategi pemungutan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi layanan dapat membantu mengembalikan efektivitas PAD.

Selain itu, penelitian (Hidayat, R., & Kurniawan, 2021) di Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa kebijakan yang mengurangi sanksi dan insentif fiskal selama pandemi menyebabkan rasio efektivitas PAD menurun. Namun, beberapa daerah menunjukkan tren pemulihan pada tahun 2021 dan 2022 berkat dukungan kebijakan dan inisiatif pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas basis pajak. Hasil ini mendukung anggapan bahwa penurunan di awal pandemi adalah hal yang biasa terjadi di banyak daerah, dan bahwa perbaikan efektif akan bergantung pada seberapa cepat adaptasi dan inovasi daerah dilakukan.

Selanjutnya, penelitian di Kabupaten Sleman (Fitriani, 2023) menemukan bahwa strategi digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kolaborasi antara lembaga dapat mempertahankan efektivitas PAD di atas 90%. Terlepas dari dampak negatif pandemi terhadap ekonomi lokal, kemajuan teknologi sangat penting untuk tetap efektif. Ini sesuai dengan

rencana yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat (BAPENDA), yang dalam beberapa tahun terakhir telah membangun sistem layanan online, menyederhanakan prosedur pembayaran pajak, dan menerapkan kampanye kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, rasio tersebut kembali turun menjadi 91,18% pada tahun 2023, tetapi masih efektif. Penurunan ini menunjukkan bahwa tantangan yang muncul setelah pandemi cukup besar. Banyak pemerintah daerah menghadapi perubahan dalam program pembiayaan setelah pandemi berakhir, pencabutan insentif fiskal, dan peningkatan kebutuhan belanja publik, termasuk untuk infrastruktur dan sektor penting lainnya. Pencapaian target penerimaan mungkin akan terpengaruh oleh tekanan inflasi, pergeseran struktur ekonomi masyarakat, dan penurunan dukungan stimulus pemerintah pusat. Menurut (Nugroho, 2023), tekanan fiskal timbul setelah pandemi karena belanja dan penerimaan yang belum pulih sepenuhnya karena perubahan struktur ekonomi dan daya beli masyarakat yang tidak stabil.

Studi terbaru yang menyelidiki dua belas pemerintah daerah Sumatera menunjukkan penurunan rasio efektivitas pascapandemi (Prasetyo, 2023). Mereka menemukan bahwa, karena berakhirnya ketergantungan pada stimulus dan kurangnya inovasi kebijakan penerimaan, sebagian besar daerah mengalami penurunan efektivitas antara 5% hingga 12% pada tahun 2023.

Selama lima tahun terakhir (2019–2023), rata-rata rasio efektivitas adalah 96,74%, yang masih dianggap efektif. Meskipun demikian, tren tahunan menunjukkan adanya fluktuasi, yang mencerminkan ketidakkonsistenan pencapaian target setiap tahunnya. Berdasarkan data sejak tahun dasar 2019, tingkat efektivitas tercatat sebesar 89,89% pada 2020, 104,04% pada 2021, 102,02% pada 2022, dan 91,91% pada 2023. Rata-rata tingkat efektivitas mencapai 97,57%, yang secara teknis masih tergolong cukup baik. Fakta-fakta ini menjelaskan betapa pentingnya melakukan tindakan strategis untuk meningkatkan hasil penerimaan dalam jangka panjang. Salah satu strategi untuk memperluas basis pajak adalah dengan memperbarui data wajib pajak, meningkatkan sistem digital, memperkuat regulasi, serta menyusun insentif fiskal bagi sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi.

Oleh karena itu, Hasil analisis rasio efektivitas BAPENDA Provinsi Sumatera Barat tidak hanya mendukung teori efektivitas publik yang diutarakan oleh Mahmudi dan Mardiasmo, temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam berinovasi dan merespons dinamika eksternal, termasuk pandemi, memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan daerah. Oleh karena itu, fluktuasi

kinerja BAPENDA selama lima tahun terakhir dianggap wajar dan dapat dikelola melalui perencanaan strategis yang berkelanjutan.

Rasio Efisiensi dan Trend Efisiensi

Rasio efisiensi mencerminkan perbandingan antara belanja yang direalisasikan dengan target belanja, serta digunakan untuk mengetahui besarnya penghematan yang dicapai oleh pemerintah.

Tabel 5. Hasil Persentase Rasio dan *Trend* Efisiensi pada Badan Pendapran Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat TA 2019-2023

TA	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi	<i>Trend</i> Efisiensi (%)
2019	90,954,728,012	87,484,437,927	96,18	Kurang Efisien	100
2020	81,470,501,464	78,458,144,623	96,3	Kurang Efisien	100
2021	63,868,330,574	60,080,652,174	94,06	Kurang Efisien	97,92
2022	89,981,555,850	85,440,379,501	94,95	Kurang Efisien	97,92
2023	90,735,782,795	77,162,611,617	85,04	Cukup Efisien	88,54
Rata – rata	83,402,179,739	77,725,245,168	93,31	Kurang Efisien	96,88

Sumber: Data olahan 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2019–2023, efisiensi kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya mencapai tingkat optimal. Rasio efisiensi yang diperoleh dengan membandingkan belanja aktual dengan belanja anggaran, rasio ini berperan sebagai indikator utama dalam menilai sejauh mana suatu badan publik memanfaatkan anggaran secara efektif. Menurut (Mahmudi, 2010), efisiensi diartikan sebagai kemampuan sebuah organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan masukan (*input*) untuk mencapai keluaran (*output*) yang telah ditetapkan. Selain itu, (Mardiasmo, 2009) Belanja pemerintah dianggap efisien ketika dana publik dimanfaatkan secara ekonomis dan memberikan manfaat yang optimal. Evaluasi efisiensi tidak hanya bergantung pada persentase realisasi anggaran, tetapi juga pada keselarasan antara penggunaan anggaran dan capaian hasilnya.

Rata-rata rasio efisiensi BAPENDA selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 93,31%, yang menurut kriteria efisiensi termasuk dalam kategori ‘kurang efisien’ (90–100%). Pada 2019, rasio efisiensi mencapai 96,18%, menandakan bahwa sebagian besar belanja yang

direncanakan berhasil direalisasikan. Berdasarkan standar pengukuran efisiensi, nilai tersebut masih diklasifikasikan sebagai 'kurang efisien' karena berada di kisaran 90–100%

Studi sebelumnya, (Mulyandani, 2022) melihat efisiensi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jawa Barat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar realisasi belanja hampir 100%, banyak kegiatan masih gagal menghasilkan output yang optimal karena penganggaran masih bersifat administratif dan inkremental. Ini menunjukkan bahwa anggaran tahun berjalan seringkali hanya mengikuti perkembangan tahun sebelumnya tanpa memeriksa kebutuhan sebenarnya. Di Sumatera Barat, metode penganggaran yang digunakan belum sepenuhnya berbasis kinerja, penelitian ini relevan.

Selanjutnya, (Wahyuni, 2018) melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman menemukan bahwa, meskipun realisasi belanja daerah sangat tinggi, efisiensi masih rendah karena belanja rutin lebih banyak digunakan daripada belanja pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja besar tidak selalu efektif jika tidak meningkatkan kinerja institusi. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi, desain anggaran yang tidak mengutamakan nilai manfaat dan evaluasi program yang menyeluruh cenderung menyebabkan efisiensi belanja rendah.

Efisiensi BAPENDA relatif konsisten pada 96,3%, 94,06%, dan 94,95% selama pandemi COVID-19, masing-masing. Selama pandemi, penurunan rasio efisiensi menunjukkan tekanan yang cukup besar terhadap keuangan daerah, yang membuat pemerintah untuk memfokuskan kembali anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti kesehatan, bantuan sosial, dan kegiatan darurat. Namun, upaya realokasi ini tidak berhasil mengurangi pengeluaran atau menjaga anggaran digunakan dengan baik. Pada saat itu, sebagian besar belanja publik dialokasikan untuk keperluan mendesak. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan perencanaan strategis serta evaluasi kinerja secara komprehensif. Akibatnya, meskipun tingkat penyerapan anggaran tinggi, efisiensi anggaran tetap rendah dan efektivitas tetap rendah.

Studi tentang Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Nurul Safitri & Syarief, 2023) menemukan bahwa selama pandemi, efisiensi belanja sedikit meningkat karena pembatasan sosial yang mengurangi aktivitas. Namun, peningkatan tersebut tidak disebabkan oleh perencanaan fiskal yang strategis, melainkan akibat pembatalan maupun penundaan sejumlah program dan kegiatan. Dalam penelitian ini, mereka menemukan penurunan rasio efisiensi belanja dari 92 persen pada tahun 2019 menjadi 88 persen pada tahun 2020. Meskipun secara teknis dianggap lebih efisien, hasilnya tidak secara signifikan menunjukkan efisiensi yang

direncanakan melalui perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja yang menyeluruh. Selama periode ini, belanja publik terutama difokuskan pada kebutuhan darurat seperti pengadaan alat kesehatan, penyaluran bantuan sosial, dan subsidi untuk UMKM. Ini dilakukan karena urgensi situasi dan menghasilkan peningkatan efisiensi yang lebih situasional daripada struktural.

Rasio efisiensi turun menjadi 85,04% pada tahun 2023, yang masuk dalam kategori cukup efisien (80–90%). Penurunan ini, bagaimanapun, dapat dianggap sebagai kemajuan ke arah efisiensi yang lebih besar, bertentangan dengan gagasan sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengelola anggaran dengan cermat, hemat, dan pendekatan yang lebih fokus dalam perencanaan target pascapandemi, yang lebih berhati-hati pada belanja prioritas yang akan langsung terlihat dampaknya.

Studi sebelumnya yang sejalan ialah (Fadilah & Dian Anita, 2024) menyelidiki rasio realisasi anggaran di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dari tahun 2019 hingga 2023. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun realisasi anggaran mencapai seratus persen, efisiensi belanja tetap stabil selama pascapandemi, terutama pada tahun 2023, berkat peningkatan mekanisme perencanaan, penentuan program unggulan, dan penggunaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan. Menurut BAPENDA SUMBAR, yang memproyeksikan rasio efisiensi sebesar 85,04% pada tahun 2023, penelitian ini relevan. Meskipun relatif efektif, hasil ini menunjukkan BAPENDA lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran setelah COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini mendukung gagasan yang mekanisme perencanaannya lebih terukur, selektif, dan berbasis kinerja dapat mempertahankan efisiensi pascakrisis.

Dengan menggunakan tahun dasar 2019 sebesar 100%, *trend* efisiensi menunjukkan penurunan secara bertahap. Pada tahun 2020, efisiensi tetap 100%, tetapi turun tajam pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 97,92%, dan kemudian turun drastis pada tahun 2023 menjadi 88,54%. Tren rata-rata 5 tahun yaitu 96,88%, dapat disimpulkan bahwa efisiensi BAPENDA belum menunjukkan pola peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, penurunan rasio efisiensi pada tahun 2023 dapat diartikan sebagai momentum awal untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar menjadi lebih efektif di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, selama disertai dengan pelaksanaan evaluasi belanja yang terencana, perbaikan sistem penganggaran, dan penguatan mekanisme pengendalian internal. Ke depan, peningkatan efisiensi yang berkelanjutan menuntut konsistensi dalam

penerapan anggaran berbasis kinerja serta komitmen kuat dari pihak politik dan birokrasi dalam melakukan reformasi anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD Provinsi Sumatera Barat dalam periode penelitian berfluktuasi dan pada beberapa tahun belum mencapai kategori “sangat efektif”. Kondisi ini memberikan isyarat bahwa Bapenda perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki strategi pemungutan PAD. Implikasinya antara lain: 0877

1. Perbaikan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Bapenda perlu melakukan penguatan intensifikasi, yakni optimalisasi pemungutan pajak daerah dari sumber yang sudah ada melalui perbaikan administrasi, peningkatan pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. Sementara itu, ekstensifikasi perlu diarahkan pada pencarian sumber PAD baru yang potensial, seperti pajak digital, retribusi jasa usaha, maupun pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap secara maksimal.

2. Optimalisasi Teknologi Informasi

Fluktuasi efektivitas PAD juga mengimplikasikan perlunya Bapenda beradaptasi dengan perkembangan digital. Penerapan sistem informasi pajak berbasis online, integrasi data antarinstansi, serta penyediaan kanal pembayaran digital akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan meminimalisasi kebocoran penerimaan.

3. Efisiensi Pengelolaan Belanja

Hasil penelitian pada rasio efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan belanja masih perlu dikendalikan agar lebih optimal. Implikasinya, Bapenda perlu menerapkan prinsip *value for money* di mana setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi pelayanan publik. Evaluasi rutin atas pos-pos belanja operasional, pengendalian biaya yang tidak produktif, dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi biaya administrasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi.

4. Penguatan SDM dan Teknologi

Perlunya pengembangan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalkan kebocoran penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas dalam pencapaian pendapatan menunjukkan pola yang fluktuatif yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, perubahan kebijakan fiskal, dan dampak pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, kategori efektivitas tergolong efektif, sedangkan pada masa pandemi tergolong cukup efektif pada tahun 2020 dan sangat efektif pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun sempat menurun selama krisis, efektivitas pendapatan berhasil dipulihkan melalui berbagai strategi inovatif, seperti digitalisasi layanan, penguatan pengawasan, serta intensifikasi dan perluasan sumber pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi terhadap tekanan eksternal dan mempertahankan kinerja pendapatan yang optimal. Pasca pandemi, kategori efektivitas kembali dikategorikan efektif.
2. Tingkat efisiensi belanja memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran masih belum mencapai efektivitas yang maksimal. Baik sebelum maupun selama pandemi, realisasi anggaran sangat tinggi sehingga dikategorikan tidak efisien. Meskipun realisasi anggaran cukup tinggi, itu belum sepenuhnya menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Belanja publik untuk kebutuhan darurat selama pandemi biasanya diarahkan tanpa perencanaan yang matang. Namun, setelah pandemi tahun 2023, kategori efisiensi BAPENDA dievaluasi dengan baik, menunjukkan tren ke arah pengelolaan anggaran yang lebih bijak dan selektif. Tahapan ini menjadi pondasi awal menuju terciptanya efisiensi struktural, sekaligus menegaskan urgensi reformasi anggaran, pelaksanaan evaluasi belanja secara sistematis, serta penguatan mekanisme pengendalian internal untuk mencapai efisiensi yang berkesinambungan.

Secara umum, kinerja keuangan BAPENDA Provinsi Sumatera Barat mencerminkan kapasitas institusi tersebut dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai tantangan eksternal. Namun, untuk membuat pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, hemat, dan akuntabel, diperlukan perbaikan jangka panjang dalam hal efisiensi belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- BARAT, B. S. (2024). *Pendapatan Asli Daerah*. <https://bapenda.sumbarprov.go.id/>
- Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA). *Media Bina Ilmiah*, 17(1), 93–100.
- Fadilah, M. N., & Dian Anita. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2457–2466. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2644>
- Fitri, F. A., & Indriani, M. (2011). Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Ditinjau dari Aspek Keprilakuan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7108>
- Fitri, & Kiswara, E. (2022). Dampak COVID-19 Terhadap kesehatan Daerah(Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Fitriani, D. (2023). Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Daerah*, 2(5), 33–42.
- Hidayat, R., & Kurniawan, A. (2021). Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Masa Pandemi COVID-19 (Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Dan Kebijakan Publik*, 1(8), 11–19.
- Ishak, J. F. (2021). Covid-19: Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 587–591.
- Koromath, J. P. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. *Lensa Ekonomi*, 11(01), 13. <https://doi.org/10.30862/lensa.v11i01.75>
- Kusumawati, O., Animah, A., & Isnawati, I. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial Kota Mataram. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(5), 643–649. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i5.216>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (EDISI KETI). UPP STIM YKPN. https://career.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3955&keywords=
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Upp Stim YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Upp Stim Ykpn. https://books.google.co.id/books?id=_W_vzwEACAAJ

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Terbaru)*. Andi.
- Medindari, K. N. A. A., Arianto, H. Y., Wahyuni, C., & Mulyani, A. S. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(1), 63–72. Efektivitas; Efisiensi; Anggaran Belanja
- Mizan, V. M., & Rahmawati, I. (2020). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Retribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Samarinda. *Jurnal Riset Inossa Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020*, 2, 99–110.
- Mulyandani, O. &. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016–2020. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(2), 484–493.
- Musgrave, R. A. (2009). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Nugroho, T. (2023). Tantangan Fiskal Daerah Pasca Pandemi. *Urnal Administrasi Publik*, 8(1).
- Nurul Safitri, S., & Syarief, A. (2023). EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGUKUR EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 237–249. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.237-249>
- Oktaviani, D. (2022). Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Dan Kebijakan Publik*, 2(11), 45–55.
- Prasetyo, N. H. & R. (2023). Efektivitas Pendapatan Daerah Pasca COVID-19: Studi Kasus di Sumatera. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 5(1).
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Sasuwuk, N. C. E., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2016). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Potensi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 139–151. <https://doi.org/10.32400/gc.11.2.13070.2016>
- Setiawan, D. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi PAD. *Jurnal Akuntansi & Kebijakan Publik*, 7(1).
- Wahyuni, N. (2018). Efisiensi Belanja Daerah: Studi di Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(1).

- Yuniawati, A. S. (2023). Analysis of the Efficiency and Effectiveness of Local Taxes in BAPENDA Sumedang Regency. *Journal of Business, Accounting and Finance*, 5(2), 8–15.
- Yusri, A. I., & Devy, T. (2025). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022*. 4(1), 45–58.